

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif tentang pengaruh administrasi yang buruk terhadap kurangnya akuntabilitas dalam Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT), dapat disimpulkan bahwa administrasi yang buruk memiliki hubungan positif dan signifikan dengan kurangnya akuntabilitas dalam penelitian BLT-DD. Hal ini meliputi tindakan diskriminatif, penggunaan wewenang, dan kewajiban hukum. Seiring dengan meningkatnya tingkat maladministrasi, demikian pula karakteristik transparansi, akuntabilitas, pengawasan, dan tanggung jawab dalam proses akuisisi bisnis.

Pemanfaatan Wewenang sebagai Faktor Utama Penyebab utama BLT-DD adalah maladministrasi oleh aparat kabupaten, seperti penerima yang tidak patuh dan intervensi publik yang tidak patuh. Pemanfaatan Wewenang Sebagai Faktor Utama Maladministrasi oleh aparat daerah seperti penerima yang tidak patuh dan campur tangan masyarakat yang tidak patuh merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya maladministrasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan BLT – DD masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat miskin. Pentingnya transparansi dan pengawasan Memperburuk Akuntabilitas dalam pengelolaan BLT – DD menyebabkan masyarakat tidak dapat memperoleh informasi yang akurat mengenai kriteria penerima, jumlah uang yang diterima, dan mekanisme perolehannya. Selain itu, sistem pengawasan baik dari masyarakat maupun lembaga pengawas memberikan peluang kepada masyarakat daerah untuk melakukan penyimpangan tanpa adanya konsekuensi yang jelas.

Tanggung Jawab Minimal dan Mekanisme Pertanggungjawaban Desa Temuan penelitian menunjukkan bahwa masyarakat sulit memahami terjadinya penyimpangan karena tidak adanya mekanisme pertanggungjawaban yang jelas. Selain itu, aparat desa kurang tanggap dalam memberikan tanggapan terhadap kebutuhan masyarakat, yang

mengindikasikan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap proses BLT-DD.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, beberapa saran untuk pemerintah yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

a. Permintaan pemerintah dan perlengkapan desa

Pemerintah desa menyelenggarakan sistem informasi publik berbasis digital yang dapat diakses oleh masyarakat mengenai data penerima manfaat dan alokasi dana BLT – DD. Segala keputusan mengenai penyaluran BLT –DD wajib diumumkan secara resmi kepada masyarakat untuk mengurangi dugaan penyalahgunaan wewenang.

b. Memperkuat pengawasan penyaluran BLT – DD

Pemantauan oleh Badan Permisyawaratan Desa (BPD), Ombudsman dan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) harus diperkuat agar penyaluran BLT – DD tidak disalahgunakan oleh pihak – pihak tertentu.

c. Peningkatan kapasitas peralatan

Aparatur desa harus diberikan pelatihan rutin mengenai tata kelola keuangan, administrasi pemerintahan dan prinsip akuntabilitas publik sehingga mereka dapat melaksanakan tugasnya secara lebih profesional. Diperlukan regulasi yang tegas untuk menindak tegas oknum yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dalam penyaluran BLT – DD.

Beberapa saran untuk masyarakat Desa Waringin Jaya yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

a. Meningkatkan peran masyarakat dalam pengawasan BLT – DD

Masyarakat harus lebih proaktif dalam memantau proses penyaluran bantuan dan melaporkan setiap indikasi penyalahgunaan atau diskriminasi dalam penyalurannya. Platform komunikasi masyarakat desa dapat digunakan sebagai sarana memberikan masukan kepada pemerintah desa mengenai transparansi BLT – DD.

b. Edukasi tentang hak dan kewajiban penerima BLT – DD

Pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kriteria penerima, mekanisme pengaduan, serta hak dan kewajiban penerima program BLT – DD.

Beberapa saran untuk penelitian selanjutnya yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

a. Mengembangkan model penilaian akuntabilitas penyaluran BLT – DD

Penelitian lebih lanjut dapat mengembangkan model evaluasi berdasarkan indeks akuntabilitas yang mencakup dimensi transparansi, tanggungjawab, pengawasan dan akuntabilitas dalam mengevaluasi efektivitas program BLT – DD

b. Menggunakan Metode Kombinasi (Mixed – Methods)

Untuk penelitian yang mendalam, metode campuran (kombinasi kuantitatif dan kualitatif) dapat diterapkan untuk memahami perspektif masyarakat dan aparat desa mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi maladministrasi dan kurangnya akuntabilitas BLT – DD.

c. Studi Perbandingan Antar Wilayah

Studi perbandingan antara desa atau daerah dengan tingkat tata kelola pemerintahan yang buruk dapat memberikan wawasan lebih jauh mengenai faktor – faktor yang memengaruhi efektivitas pemberian bantuan sosial dalam konteks yang berbeda